

BAB II

GAMBARAN UMUM LEMBAGA

2.1 Gambaran Umum Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam mengatur dan mengelola kegiatan perdagangan di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, Kementerian Perdagangan bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional, memperluas pasar ekspor, serta memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global. Dengan luasnya wilayah tanggung jawab yang mencakup berbagai aspek perdagangan, Kementerian Perdagangan memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tugas utama Kementerian Perdagangan adalah merumuskan kebijakan perdagangan yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan pasar global. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap dinamika perdagangan internasional, evaluasi terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan, serta konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Melalui proses ini, Kementerian Perdagangan berupaya untuk mengembangkan strategi perdagangan yang dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional, meningkatkan daya saing produk domestik, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

Selain merumuskan kebijakan, Kementerian Perdagangan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan perdagangan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup berbagai kegiatan seperti pengawasan perdagangan, pengaturan tarif, pemberian insentif perdagangan, serta pemantauan pasar. Dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan perdagangan, Kementerian Perdagangan berupaya untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang adil, transparan, dan teratur,

sehingga dapat memberikan perlindungan yang baik bagi para pelaku usaha serta konsumen.

Selanjutnya, Kementerian Perdagangan juga memiliki peran dalam memperluas akses pasar ekspor bagi produk-produk Indonesia. Hal ini dilakukan melalui berbagai inisiatif seperti promosi perdagangan, partisipasi dalam pameran internasional, serta negosiasi perjanjian perdagangan dengan negara-negara lain. Dengan membuka akses pasar baru bagi produk domestik, Kementerian Perdagangan berharap dapat meningkatkan volume ekspor Indonesia, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, Kementerian Perdagangan juga memiliki peran dalam melindungi kepentingan ekonomi nasional dari dampak negatif perdagangan internasional. Hal ini dilakukan melalui kebijakan proteksi perdagangan seperti penerapan tarif impor, kuota impor, serta pembatasan perdagangan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat.

Meskipun demikian, kebijakan proteksi perdagangan tersebut juga harus seimbang dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selanjutnya, Kementerian Perdagangan juga memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur perdagangan elektronik (e-commerce). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perdagangan elektronik telah menjadi salah satu tren yang semakin dominan dalam perdagangan internasional. Kementerian Perdagangan berupaya untuk menciptakan regulasi yang mendukung perkembangan e-commerce di Indonesia, sekaligus melindungi konsumen dari risiko transaksi online yang tidak aman.

Tak hanya itu, Kementerian Perdagangan juga memiliki peran dalam memberikan dukungan kepada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). UKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian

Indonesia, namun seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi persaingan pasar. Melalui berbagai program bantuan dan pelatihan, Kementerian Perdagangan berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UKM, sehingga dapat lebih aktif berkontribusi dalam perekonomian nasional.

Selain itu, Kementerian Perdagangan juga berperan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang pokok bagi masyarakat. Hal ini dilakukan melalui berbagai kebijakan stabilisasi harga, pengawasan distribusi, serta pengaturan impor dan ekspor untuk memastikan pasokan barang pokok mencukupi dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, Kementerian Perdagangan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengelola kegiatan perdagangan di Indonesia. Dengan tugas dan tanggung jawab yang luas, Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang adil, transparan, dan berkualitas. Upaya ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan keberadaannya, Kementerian Perdagangan menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam sistem perdagangan, sehingga menciptakan peluang bagi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Dengan mengatur dan mengelola kegiatan perdagangan di Indonesia. Dengan berbagai tugas dan tanggung jawabnya, Kementerian Perdagangan berupaya untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang adil, transparan, dan berkualitas, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

2.2 Visi dan Misi Badan Kementerian Perdagangan

Visi

Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Misi

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri, dan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) di Sektor Perdagangan.

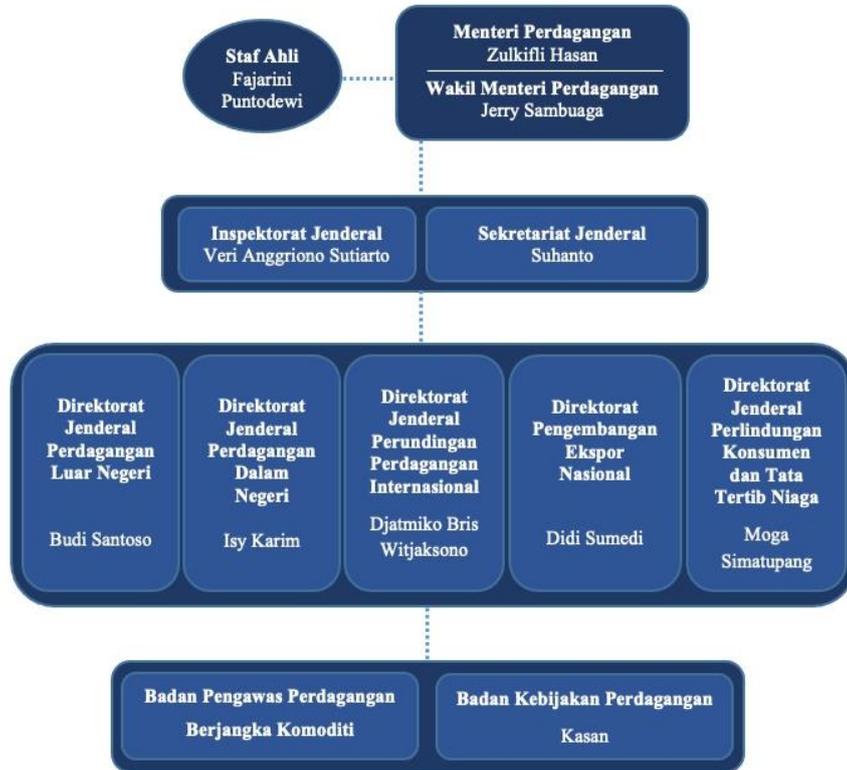
Motto Badan Kebijakan Perdagangan

“Kami ASN Badan Kebijakan Perdagangan BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.”

UMMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

2.3 Struktur Lembaga Kementerian Perdagangan

2.3.1 Struktur Organisasi Perusahaan



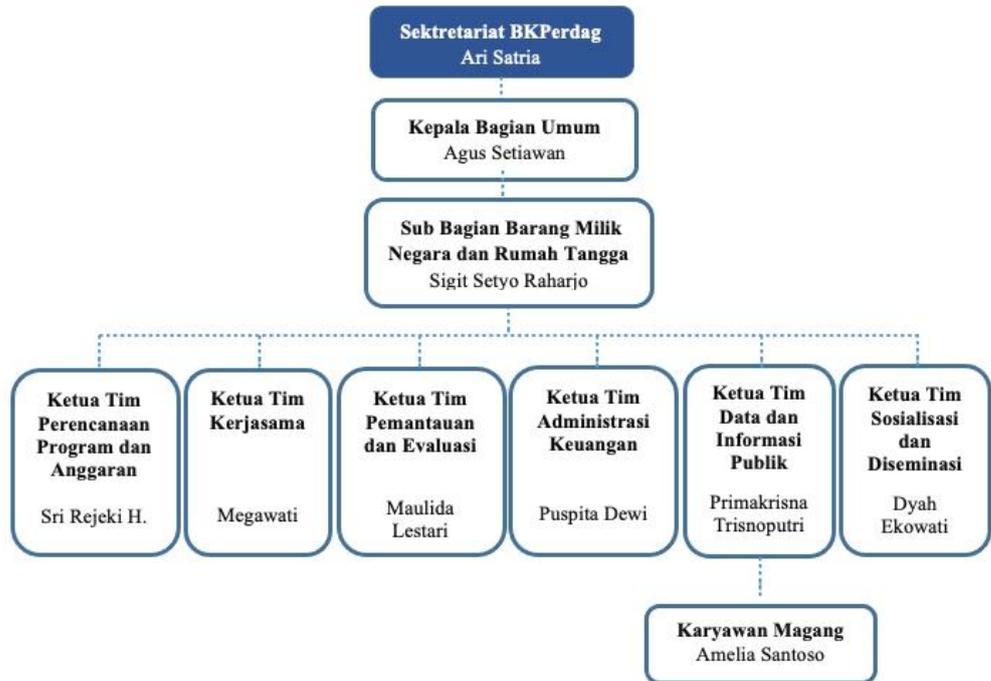
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Perusahaan

2.3.2 Struktur Organisasi Departemen



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Departemen

2.3.3 Struktur Organisasi Divisi



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Departemen

